

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang dihadapi oleh Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman. Yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Tahun 2022”.Menarik melakukan penelitian ini karena kurangnya tenaga terdidik dan terpelajar yang ada didesa dan juga kurangnya dorongan oleh pemerintah desa yang membuat tidak majunya desa ini, dan penulis akan melakukan pengumpulan data mengenai penggunaan dana desa yang selanjutnya hasil dari pengumpulan data ini penulis dapat melihat rincian-rincian penggunaan dana desa tersebut yang kemudian dapat di evaluasi oleh peneliti.

Desa tersebut diambil oleh penulis dengan alasan yang pertama karena untuk mempermudah mencari data, ekonomis, dan penulis juga akan kembali ke desanya dan membangun desanya. Permasalahan yang ada pada desa tesebut adalah :

- 1) pengelolaan Dana desa yang tidak tepat guna karena masih minim infrastruktur ataupun fasilitas desa yang belum ada. Akan tetapi dipergunakan untuk hal yang kurang bermanfaat.
- 2) Permintaan masyarakat yang tidak dapat diberikan oleh pemerintah desa karena adanya sistem skala prioritas yang dilakukan oleh pemerintah desa.
- 3) Adanya selisih angka yan cukup besar pada pendapatan dan pembelanjaan APBDES di Desa Sidoagung.

Hal ini terjadi karena aparatur pemerintah desa kurang melihat peluang hal-hal apa saja yang dibutuhkan masyarakat yang paling di utamakan. Berdasarkan total anggaran di desa Sidoagung ini sangatlah besar dan tidak sedikit, total pendapatannya yaitu Rp 3,369,495,503,00,- di tahun 2021 dan total belanja yang telah di keluarkan oleh desa sebesar Rp 1,872,508,490,- . Dengan pendapatan belanja yang diterima oleh desa, jumlah itu tidak sangatlah kecil akan tetapi hal ini masih belum bisa mengelola dan belum bisa mensejahterakan masyarakatnya dan belum bisa melaksanakan tujuan dari pemerintah pusat dan daerah.

Menarik penelitian ini dilakukan untuk dapat mengidentifikasi seluruh masalah yang terjadi terhadap implementasi kebijakan pengelolaan Dana Desa di Desa Sidoagung supaya tidak terulang masalah yang sama dan meminimalisir masalah yang akan muncul pada waktu yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Tahun 2021?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

- 1) Menambah wawasan dan kemampuan berfikir mengenai penerapan teori yang didapatkan dari mata kuliah yang telah diterima kedalam penelitian yang sebenarnya.

2) Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana diagnosa dalam mencari sebab masalah atau kegagalan yang terjadi, dengan demikian akan memudahkan pencarian alternative pemecahan masalah tersebut.

3) Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyusun strategi dari pemerintah pusat ataupun daerah dalam upaya sebagai pemanfaatan Dana desa.

b. Manfaat teoritis

Untuk menambah Pengetahuan pengalaman, pengenalan dan pengamatan terhadap Dana desa untuk pembangunan daerah sehingga penulis melakukan penelitian untuk menyelesaikan laporan skripsi.

2. Tujuan Penelitian

a. Tujuan operasional dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala kendala apa saja yang dihadapi di setiap daerah terkait dengan dana desa untuk pembangunan daerahnya.

b. Tujuan fungsional dari penelitian ini yaitu agar hasil dari penelitian dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh perguruan tinggi sebagai referensi dasar untuk mengambil satu langkah kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan anggaran Dana desa.

c. Tujuan individual adalah untuk menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, pengenalan dan pengamatan terhadap Dana desa

D. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitain terdahulu yang menjadi dasar penelitian ini :

Table 1.1. Tinjauan Pustaka

I	II	III	IV
NO	Nama Penulis	Judul Jurnal	HASIL PENELITIAN
1	Chasanah,K.,Rosyadi,S.,&Kurniasih, D.(2017)	Implementasi Kebijakan Dana Desa	Indikator penilaian kinerja implementasi kebijakan memperhatikan beberapa aspek antara lain akses, bias, ketepatan layanan, akuntabilitas dan kesesuaian program dengan kebutuhan. Desa Gumelem Kulon pada dua tahun pertama menjadi yang terbesar dari 266 desa lainnya di Kabupaten Banjarnegara dalam penerimaan dana desa (DD) dan merupakan salah satu desa yang dapat menggambarkan kondisi geografis secara umum Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan dana desa di Desa Gumelem Kulon Kabupaten Banjarnegara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan teknik pemilihan informan purposive sampling. Hasil penelitian ini yaitu Implementasi Dana Desa di Kabupaten Banjarnegara Studi Penggunaan DD di Desa Gumelem Kulon belum berjalan secara optimal. Beberapa aspek yang belum terpenuhi secara optimal diantaranya: pertama, dari sisi Aspek akses, sosialisasi yang dilakukan pada dua tahun pertama masih dengan metode lisan dan belum tersampaikan secara maksimal. Kedua, terjadi bias atau penyimpangan yaitu seluruh pemakaian DD 100% digunakan untuk pembanguna fisik, belum mengarah kepada pemberdayaan masyarakat. Ketiga, peneliti menemukan bahwa masyarakat Desa Gumelem Kulon sebagian besar masih berpendapat bahwa pembangunan fisik lebih penting dari pada pemberdayaan. Merujuk pada pembahasan hasil penelitian, beberapa aspek yang menunjukkan keberhasilan implementasi kebijakan diantaranya yaitu: Pertama, ada tradisi lokal songolasan yang mampu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dana desa. Namun songolasan sebagai media lokal ternyata belum mampu mengantarkan pada

			partisipasi ideal. Hal tersebut disebabkan karena songolasan adalah media informal, sedangkan usulan yang bisa dilaksanakan dengan anggaran dana desa adalah usulan yang melalui prosedur musyawarah berjenjang secara formal. Kedua, kegiatan pembangunan yang direalisasikan sesuai dengan kegiatan yang direncanakan. Ketiga, pemerintah Desa Gumelem Kulon sudah melaksanakan pertanggungjawaban secara horisontal kepada BPD sebagai wakil dari masyarakat dan pertanggung jawaban secara vertikal kepada bupati melalui camat.
2	Ramly, A. R., Wahyuddin, W., Mursyida, J., & Mawardati, M. (2017)	Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Pengelolaan Dan Peningkatan Potensi Desa (Studi Kasus Kec Kuala Kabupaten Nagan Raya)	Penelitian ini menganalisa implementasi kebijakan alokasi dana desa dan alokasi dana gampong yang menjadi sumber kedua dalam penerimaan keuangan desa, analisa yang dibangun melihat bagaimana kebijakan dana desa ini mampu meningkatkan potensi ekonomi desa sehingga terdapat pemerataan pendapatan pada masyarakat desa. Metode yang digunakan ialah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dana desa dan alokasi dana gampong pada kasus Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya masih belum dapat meningkatkan potensi desa melalui pemanfaatan alokasi dana desa, sedangkan potensi yang dimiliki desa sangat besar. Hal ini dikarenakan kebijakan alokasi dana desa masih di arahkan kepada pembangunan infrastruktur atau potensi fisik disamping itu masih terdapat kendala sumber daya manusia dalam pengelolaan dana desa. Gampong yang tergolong mandiri ialah gampong simpang peut yang berhasil mengelola usahanya melalui badan usaha milik gampong.
3	Muhammad Ismail, Ari Kuncoro Widagdo, Agus Widodo (2016)	Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dan memberikan pembinaan pengelolaan dana desa. Studi ini dilakukan di Desa Kismoyoso dan Desa Girioto di Ngemplak - Boyolali. Studi ini digunakan metode observasi dan wawancara. Hasilnya menunjukkan bahwa masalah utama terkait terhadap dana desa adalah kurangnya pengetahuan kepala desa dalam melaksanakan keuangan pengelolaan dana desa berdasarkan PP No. 113 Tahun 2015. Ditambah dengan a kurangnya fasilitator dari kabupaten

			<p>Boyolali untuk membantu pengelolaan dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah sistem komputerisasi untuk mengimplementasikan laporan keuangan tersebut solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Dengan menggunakan sistem komputerisasi ini, pelaporan dana desa akan dilakukan dengan cepat dan laporan keuangan juga akan lebih handal daripada melaporkan secara manual.</p>
4	Jatmiko, W. Z., Dewi, M. K., Laksana, R. D., & Prihdiyanti, A. S	Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Linggasari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)	<p>Kebijakan yang telah diterapkan Pemerintah Pusat mengenai pengembangan desa dan anggarannya untuk mendukung pertumbuhan perekonomian tentunya diperlukan SDM yang memiliki kualitas dan komitmen yang tinggi untuk dapat memanfaatkan dana yang diberikan kepada pemerintah desa agar efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan pemerintah desa dalam implementasi pengelolaan dana desa dilihat dari kesiapan SDM dan komitmen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Responden penelitian ini adalah aparatur desa dan pengurus BUMDES sebanyak 20 sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Instrumen yang digunakan yaitu dengan reduksi data, penyajian data, dan analisis langsung di lapangan.</p>
5	Suharyono (2020)	Evaluasi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	<p>Pembangunan merupakan hal terpenting di pedesaan. Semua itu bisa dilihat dari cara pemerintah mengelola keuangannya, termasuk dana desa dan dana desa. Kajian ini membahas tentang evaluasi penggunaan dana desa dan alokasi dana. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana penggunaan dana desa dan dana desa di BM belum dimanfaatkan secara maksimal, karena masih ada beberapa kegiatan program yang belum terealisasi. Sedangkan kegiatan yang belum dilaksanakan adalah pengelolaan perpustakaan milik desa, peningkatan dan peningkatan kapasitas keamanan, pembangunan/perbaikan/pembangunan gedung, pembangunan sistem informasi desa, program pendidikan, dan kegiatan penanggulangan bencana.</p>

6	Winarni, F., & Yuanjaya, P. (2016)	Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Wukirsari, Kabupaten Sleman	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Dana Desa sebagai upaya peningkatan pembangunan desa di Desa Wukirsari Cangkringan Sleman. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif yang diadopsi dari Mills dan Huberman. Rnenunjukkan hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan menggunakan dana desa berdasarkan Perda 60 Tahun 2016 penumpasan desa Wukirsari dilaksanakan. Hasil pengembangan penggunaan dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Keberhasilan implementasi kebijakan karena faktor komunikasi yang baik, sumber daya baik kapasitas manusia maupun pendanaan yang memadai, struktur birokrasi yang jelas dan terkoordinasi, serta komitmen yang baik dan disposisi birokrasi yang terintegrasi terhadap keberhasilan pembangunan desa Wukirsari.
7	Nardi Sunardi,Rosa Lesmana (2020)	Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Desa Sejahtera Mandiri Di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang	Penelitian ini bertujuan dalam upaya dan strategi mewujudkan desa sejahtera mandiri di Desa Cihambulu. Dengan metode confirmatory analys factor menggunakan uji regression weight melalui perangkat Amos SPSS 23 . Responden adalah warga desa Cihambulu sebanyak 100 orang. Hasil penelitian menunjukkan Secara langsung Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa (PPDD) berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Keuangan Desa (MKD) sebesar 5,144 > 1,96, Manajemen Keuangan Desa (MKD) berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Program Desa Sejahtera Mandiri (EPDS) sebesar 4.288 > 1,96, sedangkan secara tidak langsung Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa (PPDD) berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Efektivitas Program Desa Sejahtera Mandiri (EPDS) sebesar 1.296.
8	Pamungkas, B. D., Fitryani, V., & Saputra, A. (2021).	Analisis implementasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan implementasi pengelolaan dana desa dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat desa, mungkin di kecamatan Orong Telu. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan

		<p> mungkin kecamatan orong telu. Jurnal Ekonomi & Bisnis</p>	<p> data sekunder. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah kepala desa, kepala keuangan, kepala kesejahteraan, kepala BPD, ketua karang taruna dan masyarakat penerima dana desa. Data dianalisis dengan menggunakan teori Miles Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Possi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan dengan baik dan transparan. Untuk realisasi dana desa Desa Kemungkinan dalam bidang pembangunan fisik berupa pembangunan infrastruktur jalan dan pertanian, sedangkan dalam bidang pemberdayaan berupa, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis, Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes.), Kegiatan PKK dan Posyandu, Pemberdayaan Sosial, Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTDD) dan Pencegahan dan Penanganan Covid-19.</p>
9	<p> Mutiarin, D. (2019)</p>	<p> IMPLEMENTASI PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2016.</p>	<p> Artikel ini menjelaskan tentang implementasi penggunaan dana desa di Kecamatan Pangkalan Banteng. Dalam penggunaan dana desa ada beberapa masalah yang harus diamati, yaitu kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa masih kurang dalam mengimplementasikan penggunaan dana desa di tiga desa, yang meliputi Desa Amin Jaya, Desa Sungai Pakit dan Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat. Masalah yang dihadapi ialah kurangnya komunikasi dalam implementasi dana desa yang dapat mempengaruhi lemahnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti program realisasi dana desa. Pelaksanaan program dana desa pada tiga desa Kecamatan Pangkalan Banteng masih belum sesuai dengan prioritas dana desa. Hal itu disebabkan karena kebutuhan desa yang bervariasi dalam mengelola anggaran.</p>
10	<p> Anggalih Bayu Muh Kamim, M. Rusmul</p>	<p> Alokasi Dana Desa dan Realisasi: Studi Kasus atas Efektivitas</p>	<p> Dengan disahkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014, pengaturan tentang desa mengalami perubahan secara signifikan. Dari sisi regulasi, desa (atau dengan</p>

	Khandiq,Rama Shidqi P (2017)	Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2016-2017	nama lain telah diatur khusus/tersendiri) tidak lagi menjadi bagian dari UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desa-desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. UU Desa telah mendorong adanya peningkatan akuntabilitas publik di pedesaan yang berujung pada perlunya kapasitas untuk memastikan realisasi dari penggunaan anggaran. Pengkajian mengenai efektivitas penggunaan dana desa menjadi penting untuk melihat keberhasilan program yang diikuti dengan dorongan ‘profesionalisme’ di desa. Kajian dilakukan dengan mengambil studi kasus di Kabupaten Sleman, DIY dengan pertimbangan pada visibilitas data dan menjadi tempat asal peneliti. Kajian efektivitas penggunaan dana desa di Sleman akan dapat memastikan capaian dan masalah yang muncul dalam realisasi program. Pengkajian dilakukan dengan metode library research dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi terhadap laporan-laporan kinerja pemerintah daerah, analisis isi media online dan sosial media yang terkait pengelolaan dana desa di dua daerah. Analisis data dilakukan dari tahap reduksi data, penyajian data sampai penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dengan adanya kajian ini diharapkan dapat memperlihatkan sejauhmana capaian penggunaan dana desa di Sleman serta evaluasi terhadap masalah-masalah yang muncul dalam implementasi.
11	Hartati, S., & Fathah, R. N. (2022)	Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Akuntansi dan Governance	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan alokasi dana desa dan efektivitas kinerja keuangan di Desa Pringgasela Selatan yang mendapatkan pengurangan anggaran di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana

			desa di Desa Pringgasele Selatan secara teknis dan administratif telah terlaksana dengan baik berdasarkan ketepatan waktu pencairan alokasi dana desa, dan tingkat efektivitas kinerja keuangan sebesar 92% menunjukkan bahwa kinerja keuangan tersebut efektif. berdasarkan pencapaian tujuan, ketepatan waktu, kesesuaian manfaat, dan harapan masyarakat.
12	Suparman, E. (2014)	Implementasi Program Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara (Doctoral dissertation, Tanjungpura University)	Penelitian ini membahas mengenai implementasi program Alokasi Dana Desa (ADD) dengan tujuan mendiskripsikan proses implementasi program ADD, dilihat dari indikator pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi program ADD di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara, dilihat dari faktor Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Dana, faktor sosialisasi penyaluran dana dan faktor koordinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi program ADD di Kecamatan Sukadana belum mengarah kepada pengembangan sosial ekonomi masyarakat Desa. Karena pada Kenyataannya ADD tersebut lebih diprioritaskan atau direalisasikan pada pembangunan fisiknya, adapun pembangunan non fisik tidak terlalu banyak dianggarkan dikarenakan Desa di Kecamatan Sukadana banyak sekali pembangunan fisik yang belum ada. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program ADD dalam pemberdayaan masyarakat desa, meliputi: faktor Sumber Daya Manusia, yang masih rendah, faktor sosialisasi penyaluran terlihat belum optimal dan faktor koordinasi yang terlihat belum optimalnya.
13	Ompi, A. W. (2013)	Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi di Desa Pangu Kec. Ratahan Kab. Minahasa Tenggara)	Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi,

			yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.
14	Putra, G. (2019)	Evaluasi pengelolaan dana Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Ngajuk	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di pemukiman / dibenci, pemerintah mewujudkan Dana Desa yang mendorong pembangunan desa untuk menyediakan dana dari APBN. Namun, saat ini, masih kurangnya pemahaman aparat Desa terhadap penyelenggaraannya dan akuntabilitas pengguna dana desa yang menjadi permasalahan dalam efektifitas dan pengelolaan dana desa yang efisien. Penelitian ini dibuat untuk mendeskripsikan tentang evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Putren Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Ngajuk. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis kualitatif. Data yang digunakan adalah bersumber dari data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan beberapa orang informan dan melakukan observasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara dan lembar observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan model interaktif. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) telah direalisasikan beberapa kegiatan seperti perbaikan jalan dengan pembuatan paving, perbaikan gorong-gorong; (2) SDM dalam pengelolaan dana desa terpenuhi persyaratan, namun dalam hal pembinaan mutu tetap diperlukan; (3) dana desa belum optimal dalam membantu masalah ekonomi karena membutuhkan bantuan pembangunan infrastruktur; (4) telah dilakukan penyaluran dana desa pemerataan dan pemerataan dengan mengutamakan desa-desa yang membutuhkan; (5) itu masyarakat sangat antusias dalam berpartisipasi dalam pengelolaan desa dana khusus dalam membantu pelaksanaan pembangunan infrastruktur; (6) dana desa yang disalurkan sangat bermanfaat dan bermanfaat bagi masyarakat

			masyarakat untuk pembangunan infrastruktur.
15	AKBAR, M., & PRABAWATI, I. (2018)	Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Desa Seppong Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan dana desa di Desa Seppong masih berjalan dengan baik. Hal ini terlihat bahwa pembangunan dalam bidang pendidikan dan kesehatan tidak jalan berdampingan dengan bidang ekonomi yang sangat tertinggal, kebutuhan dasar seperti air bersih masih susah dan jalan masih rusak, hal ini juga disebabkan karena kurangnya sumber daya finansial yang menyebabkan program pembangunan terhambat, disebabkan karena desa tidak memiliki penghasilan sendiri yang dapat menopang penyelenggaraan pemerintah desa.

Penelitian ini menggunakan 15 studi terdahulu yang dijadikan referensi oleh peneliti yang berkaitan dengan penelitian ini. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini berfokus untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman pada tahun 2022.

E. Kerangka Dasar Teori

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah sebuah cara agar kebijakan dapat mencapai tujuannya. Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, sebagaimana yang dikutip Budi Winarno, membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan individu atau kelompok pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan bermuara kepada *output*, baik berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang Terdapat dua pemilahan model implementasi kebijakan menurut Riant Nugroho Dwijowijoto. Pemilahan pertama adalah implementasi kebijakan yang berpola

dari “atas ke bawah” (*top-bottom*) dan implementasi kebijakan yang berpola dari “bawah ke atas” (*bottom-top*). Pemilahan yang kedua adalah implementasi kebijakan yang berpola paksa (*command and control*) dan model mekanisme pasar (*economic incentive*).

a) Model Implementasi Kebijakan

Terdapat dua pemilahan model implementasi kebijakan menurut Riant Nugroho Dwijowijoto. Pemilahan pertama adalah implementasi kebijakan yang berpola dari “atas ke bawah” (*top-bottom*) dan implementasi kebijakan yang berpola dari “bawah ke atas” (*bottom-top*). Pemilahan yang kedua adalah implementasi kebijakan yang berpola paksa (*command and control*) dan model mekanisme pasar (*economic incentive*).

Pada Model implementasi kebijakan ini, penulis merujuk pada pemilahan pertama, yaitu:

- a) Model yang berpola dari “atas ke bawah” (*top-bottom*). Kebijakan ini merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk rakyat, dimana partisipasi lebih berbentuk mobilisasi.
 - b) Model yang berpola dari “bawah ke atas” (*bottom-up*). Kebijakan ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya diserahkan kepada rakyat.
- b) Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Implementasi Kebijakan

Dalam mengimplementasikan kebijakan, tentu ada beberapa faktor pendukung atau bahkan menjadi penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan publik tersebut, pada penelitian ini penulis merujuk pada pemikiran George C. Edwards. Ada empat factor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, yaitu:

a) Komunikasi

Dalam proses komunikasi kebijakan, ada tiga hal penting menurut Edwards, yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan. Berikut adalah penjelasannya, yaitu :

1. Transmisi, yang dimaksud disini adalah informasi yang tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak terkait
2. Konsistensi, yang dimaksud disini adalah informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga para pelaksana kebijakan dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
3. Kejelasan, yang dimaksud disini adalah informasi yang disampaikan harus jelas dan mudah dipahami. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sumber Daya.

b) Sumber Daya

sumber merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan. Sumber daya ini meliputi sumber daya manusia yang memadai, wewenang, dan fasilitas. Berikut adalah penjelasannya, yaitu:

1. Sumber daya manusia yang memadai

Sumber daya manusia (SDM) merupakan sumber yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan. Dalam mengimplementasikan kebijakan, harus didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan, keahlian dan profesional dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, tentu akan menghambat dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

2. Informasi

Informasi mempunyai dua bentuk, yaitu *pertama*, informasi bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. *Kedua*, para pelaksana kebijakan harus mengetahui orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan mentaati peraturan-peraturan pemerintah. Wewenang.

3. Wewenang

Wewenang berperan penting dalam implementasi kebijakan, terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang

ditentukan. Wewenang mempunyai banyak bentuk yang berbeda, seperti mengeluarkan perintah kepada para pejabat yang lain, wewenang dalam menyediakan dan menyalurkan dana, sebagainya.

4. Fasilitas

Fasilitas ini menyangkut sarana dan prasarana dalam menunjang dan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

c) Disposisi

Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan, tentu mereka akan melaksanakan kebijakan yang diinginkan para pembuat keputusan awal. Namun, sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka implementasi kebijakan akan sulit. Jadi kebijakan yang dilaksanakan akan berjalan secara efektif apabila mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan.

d) Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang menjadi implementor kebijakan. Birokrasi tidak hanya berada dalam struktur pemerintah, tetapi juga berada dalam organisasi-organisasi dan institusi-institusi. Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur birokrasi ini mencakup dua hal, yaitu *Standar*

Operating Prosedurs (SOP) dan fragmentasi. Berikut penjelasannya, yaitu:

1. *Standar Operating Prosedurs* (SOP)

Merupakan prosedur kerja ukuran dasar atau pedoman bagi para implementor kebijakan dalam melaksanakan kebijakan tersebut, agar sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut.

2. Fragmentasi

Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terjadi desentralisasi kekuasaan, tentu akan terjadi lemahnya pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit. Hal ini dapat terjadi karena adanya tekanan-tekanan di luar unit birokrasi, seperti kelompok kepentingan, pejabat eksekutif dan sebagainya.

e) Aktor Implementasi Kebijakan

Keberhasilan dari implementasi kebijakan, tidak luput dari peran para aktor dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Ada lima implementor dalam pelaksanaan kebijakan, yaitu:

1. Birokrasi

Di Amerika, pada umumnya kebijakan publik diimplementasikan oleh sistem badan administrasi yang kompleks. Badan administrasi ini melaksanakan tugas

pemerintah sehari-hari dan dapat mempengaruhi masyarakat melalui tindakan-tindakannya.

2. Lembaga Legislatif

Saat ini, lembaga legislatif selain sebagai pembuat undang-undang, lembaga ini juga turut dalam implementasi kebijakan tersebut.

3. Lembaga Peradilan

Keterlibatan lembaga peradilan adalah dalam konteks mempengaruhi tata kelola atau administrasi melalui interpretasi nyata terhadap perundang-undangan dan peraturan administratif dan regulasi, pengkajian ulang terhadap keputusan administratif dalam kasus yang dibawa ke pengadilan.

4. Kelompok-kelompok penekan

Kelompok penekan ini berusaha untuk mempengaruhi peraturan untuk dapat memberikan keuntungan kepada mereka.

5. Organisasi Masyarakat

Organisasi masyarakat ini menjadi aktor dalam implementasi kebijakan, karena mereka terlibat dalam pelaksanaan program-program untuk publik.

2. Pengelolaan Dana Desa

a. Definisi

Pengelolaan adalah proses pengawasan pada semua hal yang berkaitan dengan hal seperti pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Pengertian secara umum pengelolaan adalah kegiatan merubah sesuatu untuk menjadikan hal yang lebih baik dan memiliki nilai-nilai tinggi dari semula.

Menurut Nugroho (2003:119) pengelolaan merupakan istilah yang dipakai oleh ilmu manajemen, secara etimologi kata pengelolaan berasal kata dari kelola (*to manage*) yang memiliki arti proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Peter Salim dan Yenny Salim (2002, hal 695) berpendapat bawah pengelolaan yaitu memimpin, mengendalikan, mengatur, mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan bertanggung jawab atas pekerjaannya.

Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal dengan cita-cita akhir yaitu pencapaian tujuan. (Peter Salim dan Yenny Salim, 2002:534)

b. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan yaitu agar segenap sumber daya yang ada dapat di gerakan dengan sedemikian rupa, yang fungsinya untuk meminimalisir kegiatan yang berlebih salah satu contohnya pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan, oleh karenanya dengan adanya pengelolaan diharapkan semua kegiatan ataupun usaha tidak akan mengalami hal yang sia-sia dan pencapaian tujuan tidak mengalami kesulitan yang berat.

Berikut langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan menurut Afifiddin (2010:3) sebagai berikut

- 1) Menemukan strategi
- 2) Menemukan sasaran dan batas tanggung jawab
- 3) Menemukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan waktu
- 4) Menentukan batas pengukuran tugas kerja
- 5) Menentukan standar kerja yang kopten
- 6) Menentukan tolak ukur penilaian
- 7) Mengadakan pertemuan
- 8) Pelaksanaan
- 9) Mengadakan penilaian
- 10) Mengadakan review
- 11) Pelaksanaan tahap selanjutnya, berulang-ulang

c. Dana Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Dana desa merupakan anggaran yang didapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk desa dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa dikelola tertib, efisien, efektif, dan transparan. Penyaluran Dana desa memiliki 3 tahapan yaitu:

1. Tahap pertama persentase penyalurannya sebesar 20% paling cepat penyaluran pada bulan Januari dan paling lambat pencairan pada minggu ketiga bulan Juni.
2. Tahap kedua penyaluran persentasenya sebesar 40% paling cepat penyalurannya pada bulan maret dan paling lambat bulan keempat bulan juni.
3. Tahap ketiga persentase penyalurannya sebesar 40% paling cepat bulan Juli. Penyaluran Dana Desa paling lambat penyalurannya setelah 7 hari setelah Dana Desa diterima di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setiap tahapnya.

a) Indikator Pengelolaan

Indikator pengelolaan Dana desa yang sudah tercantumkan pada Pemendagri No 113 tahun 2014 sebagai berikut :

1. Transparansi, yaitu mengenai tentang keterbukaan dalam manajemen pemerintah, lingkungan, ekonomi dan social.
2. Partisipasi, yaitu pengambilan keputusan yang demokratis serta pengakuan HAM, kebebasan pers, dan mengemukakan aspirasi masyarakat.
3. Akuntabilitas, yaitu kewajiban melaporkan dan menjawab dari pertanyaan titipan amanah dari masyarakat yaitu mempertanggung jawaban kesuksesan maupun kegagalan.

Tahap pertama presentase penyalurannya sebesar 20% paling cepat penyaluran pada bulan Januari dan paling lambat pencairan pada minggu ketiga bulan Juni.

Tahap kedua penyaluran presentasese besar 40% paling cepat penyalurannya pada bulan maret dan paling lambat bulan keempat bulan juni. Tahap ketiga presentase penyalurannya sebesar 40% paling cepat bulan Juli. Penyaluran Dana Desa paling lambat penyalurannya setelah 7 hari setelah Dana Desa diterima di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setiap tahapnya.

b) Prinsip penggunaan Dana desa

Dalam penerapan proritas penggunaan Dana desa perlu memperhatikan 6 prinsip yang harus diterapkan dalam penggunaan Dana desa antara lain sebagai berikut

1. Keadilan, mengutamakan hak dan kepentingn seluruh warga desa.

2. Kebutuhan prioritas, mendulukan kepentingan desa yang lebih didahulukan, lebih mendesak untuk kepentingan sebagian besar masyarakatnya.
3. Kewenangan desa, mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
4. Partisipasi, mengutamakan kreatifitas masyarakat dan prakrsa warga.
5. Swakelola dan berbasis sumber daya desa, pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa.
6. Tipologi desa, mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas.

Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Menurut Irawan dalam Suwardane (2015: 94) mendefenisikan bahwa: “Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.” Lebih lanjut Bastian (2015:3) mengemukakan bahwa Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer ketika melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Dasar yang dikemukakan oleh bastian dalam ungkapannya mengenai fungsi manajemen adalah sebuah pondasi yang dapat dikembangkan demi menghasilkan formula tepat dalam pengelolaan dana desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 mengenai Dana adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Hal tersebut seharusnya dapat mendorong seluruh pihak untuk membantu aparatur desa didalam pengelolaan dananya ataupun sekurang-kurangnya dalam hal pengawasan.

Undang-Undang yang dikeluarkan tentang desa pada tahun 2014 yaitu, Undang-undang No.6 Tahun 2014. Dimana dalam UU tersebut dijelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapat kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara, dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. Alokasi APBN yang sebesar 10% tentu akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat. Peningkatan desa yang meningkat ini tentunya diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa dan laporan pertanggungjawaban tersebut akan berpedoman pada Permen No. 113 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 dalam Yuliansyah & Rusmianto (2016:32-33) menambahkan bahwa Pada prinsipnya dana desa dialokasikan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Namun untuk mengoptimalkan

penggunaannya, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antara lain: pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam rangka pengentasan kemiskinan, dana desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat. Penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak prioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Penggunaan dana desa mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa.

Berdasarkan penjelasan diatas maka Pengelolaan dana desa adalah Seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban Dana Desa yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

F. Definisi Konseptual

A. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujudkan.

B. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa adalah Seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban Dana Desa yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

G. Definisi Operasional

No.	Variabel	Indikator	Parameter
1.	Implementasi	Komunikasi	a. Transmisi b. Konsistensi c. Kejelasan
		Sumber Daya	a. Sumber Daya Manusia b. Informasi c. Wewenang d. Fasilitas
		Disposisi	a. Sikap antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan
		Struktur Birokrasi	a. SOP b. Fragmentasi

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Muhammad et al., 2020)

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Sidoagung, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman tahun 2021. Alasan dari pemilihan lokasi tersebut menurut informasi yang dapat digali desa tersebut kurang maksimal dalam hal pengelolaan dalam menggunakan dana desa untuk pembangunan dan

kesejahteraan masyarakatnya, hal ini yang dapat mengakibatkan kecemburuan social terhadap desa yang lain.

3. Jenis Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Penjelasan dari dua jenis data ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber penelitian (Sidiq, 2019). Data primer pada penelitian ini didapatkan dari wawancara dengan beberapa narasumber yang berkaitan dan mendukung penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tidak langsung atau data yang diperoleh dari pihak ketiga atau pengumpul data (Barlian, 2016). Data sekunder pada penelitian ini didapatkan dari sumber-sumber lain yang dapat berupa bacaan atau literatur seperti dokumen dokumen yang didapat dari internet, maupun dari buku, jurnal, laporan, dan arsip yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan menggunakan dua cara, yaitu wawancara dan dokumentasi. Penjelasan dari dua teknik pengambilan data tersebut adalah sebagai berikut:

e. Wawancara

Teknik wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan data-data subjektif seperti opini, sikap, dan perilaku narasumber terkait tema penelitian. Keunggulan pada teknik wawancara ini terletak pada detail data yang dikumpulkan sehingga dapat diambil manfaat untuk memperoleh pandangan realistik terhadap suatu fenomena yang tidak dapat dihitung secara numerik (Hansen, 2020). Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak baku dan pertanyaannya menggunakan wawancara tidak terstruktur dengan alasan agar dalam proses wawancara dengan informan dapat berjalan lebih rileks dan mendapatkan hasil informasi secara mendalam.

No.	Nama Narasumber	Status/Jabatan
1.	Edy Utomo	Lurah
2.	Sigit Suwardianto, S.Pd	Carik
3.	Riyono	Kaur/Kasi Keuangan
4.	Arsyad	Ketua RT 07
5.	Harta Tri Narya	Ketua LPMD

d. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai dokumen atau catatan terkait keadaan konsep penelitian di dalam unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian (Nabilla, 2018). Dokumentasi yang diambil berupa catatan hasil wawancara dan foto saat wawancara berlangsung.

5. Teknik Analisis Data

Dalam proses analisis data kualitatif dapat dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu dilakukan dengan merangkum, mengfokuskan pada hal yang penting untuk dicari tema dan polanya (*data reduction*). Setelah itu data disajikan dalam bentuk pola yang sesuai dengan kajian (*data display*), kemudian ditariklah kesimpulan.

a. Reduksi Data

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dan menyesuaikan dengan tema penelitian yang bertujuan untuk memfokuskan penelitian.

b. Penyajian Data

Pada tahap ini dilakukan analisis data dari semua data yang sudah terkumpul dan melakukan penyajian data secara sistematis.

c. Kesimpulan

Pada tahap terakhir ini penulis melakukan perumusan antara hubungan fenomena yang ada dengan kejadian yang terjadi di lapangan dan ditarik kesimpulan atas permasalahan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan penelitian ini akan menjelaskan pembahasan dari pembahasan universal hingga pembahasan yang spesifik dengan cara menganalisis data.

